

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDERALAYA

SKRIPSI ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



DISUSUN OLEH:
RIZKI HARTANTRI
01023120055
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
Guna mencapai gelar
Sarjana Ekonomi
2006

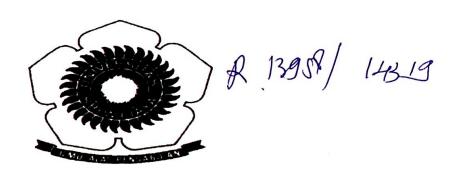
S 339.507 Hav a c-060395 book

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDERALAYA



SKRIPSI

ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



DISUSUN OLEH : RIZKI HARTANTRI 01023120055 JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
Guna mencapai gelar
Sarjana Ekonomi
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA

SELATAN

NAMA

: RIZKI HARTANTRI

NIM

: 01023120055

JURUSAN

: EKONOMI PEMBANGUNAN

KONSENTRASI

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

KEUANGAN DAERAH

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL: 01-2-06 PEMBIMBING I:

<u>Dr. H. DIDIK SUSETYO, M.Si</u>

NIP 131673860

TANGGAL: 2-2-06 PEMBIMBING II:

Dra.Hj. SA'ADAH YULIANA, M.Si NIP. 131885904

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI INDERALAYA

SKRIPSI ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DISUSUN OLEH : RIZKI HARTANTRI 01023120055 JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 13 Februari 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

Dr.H.Didik Susetyo, M.Si

NIP. 131673869

Dra.Hj.Sa'adah Yuliana, M.Si

NIP. 131885904

Drs. Harunnurasyid, M.Com

NIP.131844026

Mengetahui, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Suhet, M.Si

NIP. 131993979

MOTTO

" Kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita, tapi kita bisa membuat diri kita bermanfaat bagi semua orang"

"Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya " (HR. At Tarmidzi)

Kupersembahkan Untuk:

- Kedua Orang Tuaku
- ❖ Saudara-saudaraku
- Keluarga-keluargaku
 - * Almamaterku
- Jurusan Ekonomi Pembangunanku
 - ❖ Sahabat-sahabatku

ABSTRAKSI

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan barang-barang bergerak dan tidak bergerak atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah. Objek-objek retribusi pemakaian kekayaan daerah ini meliputi : (1) Pemakaian tanah; (2) Pemakaian bangunan; (3) Pemakaian ruangan untuk pesta, seminar, kursus, dsb; (4) Pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik daerah; serta (5) Pemakaian kekayaan lainnya. Dari beberapa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah ini dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan retribusi Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini menggunakan Teori Lindahl dan Samuelson mengenai penyediaan barang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis mengenai penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan keberadaannya sebagai salah satu sumber penerimaan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya mengenai pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari sudut pandang potensi, efisiensi, efektifitas, dan elastisitasnya terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 1999 sampai tahun 2005.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Suumatera Selatan pada tahun 2000 dan 2002 adalah besar, yaitu sebesar Rp 1.159,40 juta dan Rp 3.671,06 juta. Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah ini efisien tapi tingkat efektifitasnya rendah, karena realisasi penerimaannya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selama 6 tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2004, koefisien elastisitas retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 0,49 (dengan cara pertumbuhan). Hasil ini menunjukkan bahwa elastisitas retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah lebih kecil dari 1 atau bersifat inelastis, yang berarti bahwa apabila terjadi perubahan pada PDRB sebesar 1 %, maka akan menyebabkan perubahan yang relatif kecil pada penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 0,49 %.

Kata-kata kunci : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Potensi, Efisiensi, Efektifitas, dan Elastisitas terhadap PDRB.

ABSTRACT

Retribution of using region's asset is a retribution which is collected for using moveable and dismoveable goods of using region's asset service which is gived by region government. The objects of this using region's asset retribution are: (1) The use of land; (2) The use of building; (3) The use of room for party, seminar, course, etc; (4) The use of region's vehicles and heavy tools; (5) The use of another assets. From the objects of using region's asset retribution give contribution for receiving Sumatera Selatan Province's retribution.

This research uses Lindahl's and Samuelson's theories about supply of public goods. This research intend to get description and to analyze using region's asset retribution as one of region's receipt source of Sumatera Selatan Province, especially about collecting using region's asset retribution from aspect of potency, efficiency, effectivity, and elasticity of PDRB Sumatera Selatan Province since 1999 until 2005.

From this research shows that potency of using region;s asset retribution of Sumatera Selatan Province in 2000 dan 2002 are big, that's are Rp 1.159,4 million and Rp 3.671,06 million. The collecting of using region's asset retribution is efficient, but the effectivity is low, because the realization of using region's asset retribution is not yet reach all the targets of Sumatera Selatan Governmance. During six years, from 1999 till 2004 shows that the elasticity coefficient of using region's asset retribution is 0,49 (by growth method). This result shows that the elasticity of using region's asset retribution is less than 1 or inelastic, which means that the change of PDRB into 1 % can caused the small change of using region's asset retribution into 0,49 %.

Keywords: Using Region's Asset Retribution, Potency, Efficiency, Effectivity, and Elasticity of PDRB.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan isi skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :

- Bapak Dr. Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bapak Drs. Suhel, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Ibu Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
- 3. Bapak Dr. H. Didik Susetyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, nasehat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga menjadi Haji yang Mabrur.

- 4. Ibu Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, nasehat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
- 5. Bapak Drs. Harunnurasyid, M.Com selaku Anggota Penguji dalam ujian komprehensif penulis. Terima kasih banyak atas saran dan kritik yang telah bapak berikan dalam ujian komprehensif.
- 6. Bapak Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc selaku Dosen Penasehat Akademik bagi penulis selama kuliah. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, nasehat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah.
- 7. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu, dan materi perkuliahan selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan di Jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya dan Fakultas Ekonomi umumnya beserta staf pegawai karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis.
- 8. Para Staf dan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta instansi-instansi yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas izin dan informasi yang telah diberikan kepada penulis untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan skripsi penulis.
- 9. Kedua Orang Tuaku, H.M. Hariq Harun dan Hj. Pauziah. Terima kasih banyak atas do'a, nasehat, bimbingan, waktu, tenaga, dan materi yang telah

- diberikan kepada penulis semenjak penulis lahir di bumi ini sampai sekarang. Semoga Mama dan Papa bisa menjadi pasangan yang terbaik di sisi Allah SWT, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.
- 10. Saudara-saudaraku, Kak Pebri dan Yuk neti, Yuk Wik, Dek Agung, dan keponakanku Adek Fathur. Terima kasih atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
- 11. Seluruh Keluarga Besarku, Kel. Kakek Harun, Kakek Sangid, Kakek Lungguh, dan Nenek Zaenab. Terima kasih atas do'a, nasehat, dan motivasinya selama ini. Semoga Keluarga Besar kita tetep solid dan bersatu...
- 12. Sahabat-sahabat Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2002, Anita, Yeni, Wulan, Septi, Listya, Habib, Barnas, Rawal, Dani, Ajib, Robert, ..., Nofri dan Tomi, serta semua Teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan pikiran, tenaga, waktu, dan persahabatan yang telah diberikan selama kuliah. Be the Best Friends Forever...
- 13. Sahabat-sahabatku, Yuni, Diah, Meri, Okta, Ully, Sri, Meri SH, Pri, Eli, Ima, Tika, Santi, Rizki AT, DLL. Terima kasih atas motivasi dan persahabatannya selama ini. Be The Best Friends Forever and Don't forget our friendships...
- 14. Komputer dan Motor *Smash* yang selalu menemani penulis di saat mengetik skripsi dan pergi mencari data. Meskipun kalian tidak bisa bicara, tapi terima kasih banyak atas jasa yang kalian berikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

15. Buku diari "Gadis" dan Buku harian "Micky and Minnie" ku, yang selalu menemani penulis di kala sedih dan rindu akan kenangan masa lalu. Terima kasih atas bersedianya menjadi tempat curahan hatiku dan coretan tanganku selama ini. Be the books which wrote all of my memories.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini dan bantuan semenjak penulis lahir sampai sekarang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan pahala atas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.

Palembang, 18 Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Abstraksi	•••••		l
Abstract II			ii
Kata Pengan	tar	***************************************	111
Daftar Isi		***************************************	VII
Daftar Tabel			ix
Daftar Gam	bar		X
BAB I	PEN	NDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Perumusan Masalah	10
	1.3	Tujuan Penelitian	10
	1.4	Manfaat Penelitian	11
BAB II	TIN.	JAUAN PUSTAKA	
	2.1	Landasan Teori	12
	2.2	Penelitian Terdahulu	21
	2.3	Hipotesis	23
BAB III	ME	TODOLOGI PENELITIAN	
2.22	3.1	Ruang Lingkup	24
	3.2	Jenis dan Sumber Data	24
	3.3	Metode Pengumpulan Data	25
	3.4	Teknik Analisis	
	3.5	Batasan Variabel Operasional	
BAB IV	HAS	IL DAN ANALISIS	
DAD IV	4.1	Tinjauan Ekonomi	
	т. 1	4.1.1 Struktur PDRB	34
		4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	
		4.1.3 Pendapatan Per Kapita.	
	4.2	Tinjauan Keuangan Daerah	40
	7.2		42
		4.2.1 Struktur APBD	42
		4.2.2 Perkembangan PAD dan Restribusi Daerah	
		4.2.3 Gambaran tentang Retribusi Pemakaian Kekaya Daerah	an 47
		4.2.4 Perkembangan Penerimaan Retribusi Pemakaia	
		Kekayaan Daerah	52
	4.3	Analisis Potensi Retribusi Remekajan Kekayaan Daera	Truballa and
		Provinsi Sumatera Selatan	54
		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	306 TH F4
		Man And Francis (1) CO.	55
		vil TANGGAL : 13 - MART	06

	4.4	Kekayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 4.4.1 Analisis Efisiensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	65 ah n 70
BAB V	PEN	NUTUP	
	5.1	Kesimpulan	76
	5.2	Saran-saran	80
DAFTAR I LAMPIRA		AKA	83
- Tabe	el Tar	if Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Penggunaan	ı:
Tabe		Tanah dan Bangunan	
		Alat-alat Berat	
		Alat-alat Eksplorasi Pertambangan	
		Jasa Mobil Derek	0-1-4
		Aset aset di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera	
		Aset-aset di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selata Aset-aset di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera	
	7.	Aset-aset di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera	Selatan
- Hasi	l Perl	nitungan Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pro Selatan Tahun 2000 dan 2002	ovinsi
Sulli	aicia	Sciatali Talluli 2000 Uali 2002	
- Prin	t Out	Hasil Regresi Nilai Elastisitas Retribusi Pemakaian Kekaya rovinsi Sumatera Selatan	an

DAFTAR TABEL

1.1	Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2005 4
1.2	Realisasi Penerimaan Retribusi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 7
4.1	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga
	Konstan Tahun 1993 Menurut Sektor (Dengan Migas) Tahun 1999-2004 35
4.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan ADHK Tahun 1993
	Menurut Sektor Tahun 1999-2004
4.3	Pendapatan Per Kapita Provinsi Sumatera Selatan ADHK Tahun 1993 dari
	Tahun 1999-2004
4.4	Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2004
4.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD
	Provinsi Sumatera Selatan
4.6	Objek-objek Retribusi Pemakajan Kekayaan Daerah Provinsi Sumatera
	Selatan Beserta Instansi Pemungutnya
4.7	Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi
	Sumatera Selatan
4.8	Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
	Tahun 2000
4.9	Tahun 2000
	Tahun 2002
4.10	Rasio Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Realisasi
	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.11	Nilai Efisiensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Sumatera
	Selatan Tahun 1999-2005
4.12	Nilai Efektifitas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Sumatera
	Selatan Tahun 1999-2005
4.13	Tingkat Efectivitas Retribuís Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Sumatera
	Selatan Tahun 1999-2005
4.14	Nilai Elastisitas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Sumatera
	Selatan Dengan Cara Pertumbuhan Tahun 1999-2004 69
4.15	Hasil Estimasi Regresi dengan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan
	Daerah Sebagai Variabel Terikat72
	1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

DAFTAR GAMBAR

2.1	Analisis Samuelson Mengenai Teori Lindahl	5
4.1	Pendapatan Per Kapita Provinsi Sumatera Selatan ADHK Tahun 1993 Denga Migas dan Tanpa Migas Tahun 1999-2004	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan bagi pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten untuk membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Kedua undang-undang ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antara pusat dan daerah serta memberikan implikasi adanya desentralisasi yang akan menyebabkan otonomi daerah diperluas, baik jangkauan maupun kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Menurut Halim (2001: 6), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah: (1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave dan Musgrave (1991: 372), dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat juga menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat dan dapat menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif di daerah tersebut. Dalam hal ini, kinerja keuangan daerah positif diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri (Halim, 2004: 8-9).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2, disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah meliputi : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari ketiga sumber penerimaan daerah tersebut, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi daerah, karena

pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah juga merupakan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerahnya.

Suatu daerah mempunyai wewenang penuh untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerahnya. Besar kecilnya PAD dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Jika potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah semakin besar, maka menunjukkan bahwa potensi PAD di daerah tersebut juga semakin besar (Susilo dalam Adriana, 2005: 4). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Daerah yang berhasil meningkatkan PADnya secara nyata berarti daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerahnya secara optimal.

Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang bersumber dari PADnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan Tabel 1.1, yang memperlihatkan bahwa semakin meningkatnya penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD ini dapat menunjukkan bahwa adanya kinerja keuangan daerah yang positif at PKWIST Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2005
(Dalam Juta Rupiah)

	REALISASI PAD				
Tahun Pajak Daerah		Retribusi	Kekayaan	Penerimaan	Total PAD
	J	Daerah	Daerah yang	Lain-lain	
			Dipisahkan	PAD yang sah	
1999	70.795,73	1.099,87	1.810,27	4.046,53	77.552,40
2000	104.273,70	1.734,57	2.089,88	11.657,49	119.755,64
2001	164.856,09	3.445,47	3.556,08	18.664,01	190.521,65
2002	225.791,64	3.034,49	4.204,49	56.604,00	289.634,62
2003	310.116,19	3.200,60	10.439,73	10.323,92	334.080,44
2004	413.657,15	4.707,58	13.695,67	61.072,16	493.132,56
2005*	511.381,78	11.586,08	20.283,00	53.578,63	596.729,49
		1			

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan: * = Angka Sementara

Dari Tabel 1.1. di atas, diketahui bahwa PAD Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah, dari tahun 1999 sampai tahun 2005 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih menitikberatkan penerimaan daerahnya pada beberapa sumber penerimaan daerah yang dianggap relatif besar dan menghapus beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang dianggap tidak relevan serta disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran Masyarakat Sumatera Selatan untuk membayar pajak daerah.

Maksimisasi PAD ini dapat berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena pemberi kontribusi terbesar PAD adalah dua

komponen tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah daerah tidak menambah pungutan yang bersifat pajak atau tidak menambah jenis pajak baru. Jika mau menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi. Kebijakan untuk meningkatkan retribusi daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik. Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas layanan publik, karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik melalui retribusi daerah (Mardiasmo, 2002: 148-149).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1: 140). Retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar potensinya untuk digali dan ditingkatkan pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut langsung atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penerimaan dari retribusi daerah merupakan sumber dana bagi peningkatan volume barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.

Kaho dalam Hermanto (2004: 14) mengemukakan bahwa ciri-ciri dari retribusi daerah adalah: (1) Retribusi dipungut oleh daerah; (2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan oleh daerah yang langsung dapat ditunjuk; (3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah. Ciri-ciri tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan suatu jenis pungutan dapat dikatakan sebagai retribusi atau tidak. Dalam pelaksanaannya, hasil dari pungutan retribusi ini dapat berfungsi bagi pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Adapun Fungsi dari retribusi daerah meliputi: (a) Sebagai sumber penerimaaan, artinya retribusi daerah dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi; (b) Sebagai pengatur, artinya pungutan retribusi daerah dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Suparmoko, 1999: 97).

Provinsi Sumatera Selatan diberi kesempatan untuk menggali potensi sumbersumber keuangan daerahnya dengan menetapkan jenis-jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penetapan jenis-jenis retribusi daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini hendaknya dapat memenuhi ciri-ciri retribusi daerah yang telah disebutkan di atas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta realisasi penerimaannya pada tahun 2003 dapat ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 (Dalam Ribu Rupiah)

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan
1.	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	-
2.	Ret. Pengujian Kapal Perikanan	3.683
3.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	191.341,6
4.	Ret. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess	117.470
5.	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	46.374,4
6.	Ret. Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah	70.000
7.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	95.073,7
8.	Ret. Pengolahan Pembuangan Limbah Cair	4.124,8
9.	Ret. Analisa Limbah	138.046,1
10.	Ret. Izin Usaha Perikanan	22.144
11.	Ret. Izin Trayek	15.584
12.	Ret. Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio	37.930
13.	Ret. Pelayanan Kesehatan pada RSK Paru-paru	198.023
14.	Ret. Pelayanan Kesehatan pada RS Jiwa	1.215.138,7
15.	Ret. Pelayanan Kesehatan pada RSK Mata Masyarakat	293.505,5
16.	Ret. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	214.799,4
17.	Ret. Izin Trayek ASDP dan Lintas Kabupaten/ Kota	12.585
18.	Ret. Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang	3.300
	Berbahaya di Sungai & Danau Lintas Kabupaten/ Kota	
19.	Ret. Jasa Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor	68.135
20.	Ret. Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah	217.770,1
	Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Usaha	
	Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri	
1	dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik	
21.	Ret. Wajib Latih dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja	-
	Perusahaan	-
22.	Ret. Biaya Tera	53.291
23.	Ret. Jasa Pelayaanan Pengawasan % Sertifikat Mutu	182.277,3
	Barang	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari ke-23 jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Selatan di atas, hanya retribusi pemakaian kekayaan daerah yang akan dibahas lebih mendalam lagi.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan barang-barang bergerak dan tidak bergerak atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha, karena retribusi ini disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah ini antara lain meliputi : (1) Pemakaian tanah; (2) Pemakaian bangunan; (3) Pemakaian ruangan untuk pesta, seminar, kursus, dsb; (4) Pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik daerah; serta (5) Pemakaian kekayaan lainnya. Objek-objek retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut merupakan kekayaan daerah yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu, kekayaan daerah yang pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan negara harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pemerintah daerah hendaknya mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah sebaiknya perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi atas nilai dan potensi kekayaan daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002: 241).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 jo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan bahwa objek-objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain meliputi : (1) Gedung Wanita Sriwijaya di Jalan Rajawali termasuk kursi dan meubel lainnya; (2) Gedung Taman Budaya Sriwijaya di Jalan POM Kampus termasuk kursi dan meubel lainnya; (3) Lapangan Parkir Sriwijaya; (4) Panggung Kesenian Lapangan Parkir Sriwijaya; (5) Sewa kendaraan dan alat-alat berat; (6) Penggunaan jasa mobil Derek; (7) Sewa alat eksplorasi pertambangan; (8) Sewa gedung, aula, dan asrama; (9) Sewa asrama dan kelas belajar; (10) BPKB, BLPT, Museum, dan Monpera; (11) Sewa rumah dinas. Dari beberapa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut, tentunya dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan retribusi Provinsi Sumatera Selatan, khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya mengenai pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Sumatera Selatan dari sudut pandang potensi, efisiensi, efektifitas, dan elastisitasnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Sumatera Selatan?
- b) Bagaimana efisiensi dan efektifitas retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
- c) Bagaimana elastisitas retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efisiensi dan efektifitas retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai elastisitas retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi keuangan daerah yang berupa pengetahuan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b) Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan informasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sumber penerimaan daerahnya, khususnya dari retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah.
- c) Beberapa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau referensi untuk pendalaman penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Nazri, 2005, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PAD di Sumatera Selatan, Skripsi Universitas Sriwijaya. Tidak Dipublikasikan.
- BPS, 2004, PDRB Propinsi Sumatera Selatan dari Sisi Produksi. PT BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS, 2003 dan 2004, Sumatera Selatan dalam Angka: PT BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Chandra, Pain, 2005, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Kebersihan atau Persampahan di Kota Palembang, Skripsi Universitas Sriwijaya. Tidak Dipublikasikan.
- Davey, K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Pusat*, Penerjemah Amanullah dkk, Jakarta: PT UI Press.
- Deflanora, 2004, Analisa Potensi Pajak Hiburan Bioskop Kotamadya Jakarta Selatan, Thesis Universitas Indonesia.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Penerjemah Masri Maris, Jakarta: PT UI Press.
- Dispenda, 2001 dan 2005, *Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka*: PT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Halim, Abdul, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamrolie, Harun, 2003, Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta: PT BPFE.
- Hermanto, 2004, Analisis Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang, Skripsi Universitas Sriwijaya, Tidak Dipublikasikan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang *Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah*.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2001, Ekonomi Publik, Edisi 3, Yogyakarta: PT BPFE.

- Musgrave, Richard. A dan Peggy B. Musgrave, 1993, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Penerjemah Alfonsus Sirait, Edisi Kelima, Jakarta: PT Erlangga.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: PT Andi Yogyakarta.
- Oktafeni, Harini, 2005, *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lahat*, Skripsi Universitas Sriwijaya. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2001, *Ekonomika Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta: PT BPFE.
- Suparmoko, M, 2000, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5, Yogyakarta: PT BPFE.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, disahkan pada Tanggal 15 Oktober 2004 di Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesi Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Disahkan pada Tanggal 15 Oktober 2004 di Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yulianto, Adi, 2004, *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Palembang*, Skripsi Universitas Sriwijaya. Tidak Dipublikasikan.
- Zeth, Rachman, 2003, Analisis Elastisitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap PAD, Thesis Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Tidak Dipublikasikan.